

# **TINDAKAN MENEMPATI RUMAH TANPA HAK DITINJAU BERDASARKAN PASAL 167 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Yohanes Anugrah Wibowo  
120116006

Ilmu Hukum, Universitas Surabaya  
Pembimbing : Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.  
Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

## **ABSTRAK**

Hukum pidana di Indonesia sebagai hukum publik diatur pada KUHP. KUHP merupakan aturan yang bersifat umum mengenai aturan terhadap tindak pidana di Indonesia, oleh sebab itu menjadi pedoman terhadap aturan-aturan tindak pidana yang bersifat khusus. Salah contohnya adalah UU Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan aturan yang bersifat khusus dan terhadap tindak pidananya akan merujuk pada aturan tersebut sebagai aturan khusus dan apabila dalam undang-undang tersebut tidak diatur maka akan merujuk pada KUHP. Penerapan hukum mengenai kejahatan pada bidang pertanahan dan perumahan pada prakteknya terdapat ketidaktepatan penerapan hukum. Hal tersebut bukan disebabkan dari undang-undang melainkan terhadap penerapan hukum oleh para penegak hukum dan perkembangan kejahatan yang berubah-ubah sehingga mengakibatkan perubahan pula terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya terkait dengan suatu tindakan menempati rumah tanpa hak. Pada praktek peradilan di Indonesia tindakan tersebut selalu diarahkan pada penegakan hukum privat atau perdata saja padahal terdapat ketentuan dalam KUHP yang mengatur tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana.

Kata kunci : tindak pidana, kejahatan pertanahan, kejahatan perumahan.

***ACTION PLACING HOME WITHOUT RIGHTS REVIEWED BY ARTICLE  
167 BOOK OF CRIMINAL LAW***

*Yohanes Anugrah Wibowo  
120116006*

*Law, Surabaya University*

*Contributor: Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.*

*Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.*

***ABSTRACT***

*Criminal law in Indonesia as a public law regulated in the Criminal Code. The Criminal Code is a general rule about the rules of criminal offenses in Indonesia, therefore it becomes a guideline for specific criminal acts rules. One example is the Law on Housing and Settlement which is a special rule and the criminal will change the rule as a special rule and regulation in the law that will be regulated in the Criminal Code. The application of the law on land and housing issues in practice is an inaccurate application of the law. This is not related to laws and regulations that oppose the application of law by law enforcers and developments that change changes to the laws and regulations in Indonesia. In judicial practice in Indonesia, these actions are always directed at private or civil law enforcement even though there are provisions in the Criminal Code that regulate these actions as a follow up to crime.*

*Keywords: crime, land crime, housing crime.*